

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY. JEN. SUTOYO, CILILITAN JAKARTA TIMUR

SUMBER: ROMPAS HARI/TGL: JUMAT HL. KOL.: 01/ BID: 9
1-4-2011 12.5

SUBJEK: DEMOKRASI - LIBYA

Serangan Koalisi atas Libya

Oleh HIKMAHANTO JUWANA

Presiden SBY telah menyampaikan pernyataan Indonesia terkait krisis di Libya. Presiden menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai atas demokratisasi di Libya.

Pernyataan itu disampaikan beberapa jam setelah pidato Presiden Barack Obama. Di situ Obama menegaskan bahwa AS berpartisipasi dalam serangan koalisi untuk misi kemanusiaan. Ditegaskan pula, AS tak bermaksud mengganti perubahan rezim di Libya. Serangan pesawat tempur Khadafy telah diarahkan kepada rakyat sipil di Benghazi yang ingin agar Moammar Khadafy turun dari kekuasaan.

Berdasarkan frekuensi serangan koalisi yang didaku sebagai upaya penegakan atas Resolusi 1973 Dewan Keamanan (DK) PBB, timbul pertanyaan: apa motif serangan itu? Benarkah demi menegakkan Resolusi 1973?

Bila demikian, seharusnya serangan koalisi ditujukan kepada setiap pesawat tempur Libya yang mengudara. Kenyataannya, serangan ditujukan kepada berbagai instalasi militer Libya. Artinya, koalisi melakukan serangan antisipatif. Ia tak sekadar menyerang pesawat tempur Libya yang terbang, tetapi juga melumpuhkan kemampuan militer.

Kemampuan militer Libya telah dilumpuhkan secara signi-

fikan. Sejumlah pejabat militer tentara koalisi menyatakan begitu. Bahkan, beberapa waktu lalu Obama menyatakan, serangan udara terhadap Libya telah sukses. Sayang, hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda serangan koalisi akan berakhir.

Tiga tujuan

Apakah serangan koalisi untuk menurunkan Khadafy? Tampaknya tujuan menurunkan Khadafy sangat beralasan. Paling tidak ada tiga tujuan. Pertama, memastikan agar Khadafy dapat dicegah meneror negara-negara koalisi. Sebagai sosok yang tak terprediksi, bukan tak mungkin Khadafy akan membalas bila masih berkuasa.

Khadafy telah membuktikan diri, sebagai penebar teror pada 1988 ketika pesawat Pan Am diledakkan para agennya di Lockerbie. Dalam konteks ini serangan koalisi atas Libya menjadi bumerang. Serangan itu telah memicu berkembangnya terorisme, bahkan yang disponsori oleh negara. Tak heran, koalisi hendak melucuti Khadafy dari kekuasaan agar dapat dipastikan teror kepada negara mereka tak terjadi.

Kemungkinan lain pelucutan Khadafy dari kekuasaan adalah demi memastikan kepemimpinan Libya digantikan sosok pro-Barat, tokoh yang bersahabat dengan Israel, dan figur yang menghormati hak asasi manusia. Bila ini intensi koalisi, ia berpotensi memicu perang saudara di Libya. Kemunculan seorang

tokoh Libya dukungan Barat akan mengundang antipati rakyat Libya, termasuk mereka yang menginginkan Khadafy turun.

Bila benar serangan koalisi untuk menurunkan Khadafy, koalisi telah mencampuri urusan dalam negeri Libya. Jelas ini melanggar hukum internasional. Pasal 2 Ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip nonintervensi. Belum lagi Resolusi 1973 yang dalam konsideransnya menegaskan, resolusi diterbitkan dengan memerhatikan kedaulatan, ketutuhan, dan persatuan Libya.

Motif lain bagi serangan koalisi bisa jadi terletak pada isu minyak. Isu ini mencuat sebab krisis di Libya melejitkan harga minyak, yang tentu berakibat pada perekonomian negara koalisi dan dunia. Ada pula rencana Khadafy menasionalisasi perusahaan minyak asal negara yang tergabung dalam koalisi. Lebih jauh ada yang menduga serangan dilakukan agar negara koalisi dapat mengendalikan harga minyak dan pasokan.

Seandainya satu dari tiga motif tadi menjadi alasan bagi koalisi, yang saat ini serangan terhadap Libya dikendalikan NATO, penggunaan kekerasan demikian menjadi ilegal. Di samping itu, motif di luar mandat Resolusi 1973 butuh pasukan darat. Serangan darat tak mungkin cepat berakhir. Situasi di Afghanistan dan Irak akan membayangi situasi di Libya. Itu sebabnya sikap Indonesia menyerukan gencatan senjata patut diapresiasi. Gen-

SUMBER:

HARI/TGL.:

HLM/KOL.:

BID:

catan senjata tidak hanya pada serangan koalisi, tetapi juga pada serangan tentara Libya yang loyal kepada Khadafy.

Sikap Indonesia tentu akan lebih diapresiasi dunia jika saja Presiden SBY mau menyatakan bahwa serangan koalisi telah menyimpang dari Resolusi 1973. Pernyataan Indonesia yang demikian akan sama dahsyatnya dengan pernyataan Rusia, Jerman, dan China.

Langkah Indonesia

Kini pemerintah perlu mengayunkan sejumlah langkah. Pertama, pemerintah perlu memastikan agar DK-PBB mengevaluasi serangan koalisi atas Libya. Selanjutnya pemerintah bersama negara lain ikut berperan dalam demokratisasi di Libya untuk mencegah perang saudara yang bakal makan korban rakyat sipil.

Pemerintah bisa mewujudkan komitmen seruan penyelesaian nirkekerasan dengan mengirim pasukan TNI bagi operasi menjaga perdamaian dalam kerangka pasukan PBB.

Terakhir, pemerintah perlu memikirkan usul bersama negara lain jalan keluar terbaik bagi Khadafy agar mau melepas kekuasaannya secara damai. Sikap, suara, dan peran Indonesia diperlukan untuk memastikan agar dunia Islam tidak harus berhadapan dengan Barat.

HIKMAHANTO JUWANA

Guru Besar

*Hukum Internasional
Fakultas Hukum UI*